

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Melalui uraian pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa Korea Utara adalah negara yang terletak di wilayah Asia Timur menjadi salah satu negara dunia yang menjadi pusat perhatian masyarakat internasional berkaitan dengan kapasitas senjata rudal dan nuklir ICBM yang dimiliki oleh negara ini di bawah kepemimpinan Kim Jong Un.

Keberadaan ICBM (*Intercontinental Ballistic Missile*) Korea Utara kemudian menjadi persoalan serius yang menyebabkan memanasnya konstelasi politik-keamanan internasional, khususnya di wilayah Laut China Selatan dan Asia Timur. Kondisi ini kemudian berkembang semakin kompleks, ketika hubungan Korea Utara dengan negara-negara Asia Timur belum mencapai rekonsiliasi, diantaranya dengan Korea Selatan dan Jepang. Inilah yang kemudian menimbulkan rasa kekhawatiran karena daya jangkau ICBM Korea Utara yang sewaktu-waktu dapat menjangkau wilayah Jepang.

Jepang dan Amerika Serikat sebagai dua negara yang bersekutu dan memiliki hubungan penting kemudian menjalankan kerjasama yang berhasil merubah sistem pertahanan Jepang yang semula pasif menjadi aktif. Hal ini menjadi kasus yang menarik karena sejak perang dunia II, Jepang memiliki konsensus untuk tidak mengembangkan armada tempur berkaitan dengan pasal 9 konstitusi Jepang. Dengan demikian selama ini Jepang merupakan negara yang memiliki sistem pertahanan pasif, artinya negara ini tidak diperkenankan untuk membangun sistem pertahanan moderen, sehingga dalam mewujudkan stabilitas keamanan dalam negerinya Jepang memiliki ketergantungan (*dependensi*) dengan Amerika Serikat.

Berkembangnya potensi ancaman regional Asia Timur, termasuk Laut China Selatan dan internasional

mendorong para stakeholder di Jepang, baik legislatif ataupun eksekutif yang berujung pada tercapainya kesepakatan bahwa Jepang akan mulai membangun sistem pertahanan aktif, serta terlibat lebih jauh dalam mendukung perdamaian internasional. Kebijakan ini kemudian berhasil terealisasi pada era kepemimpinan shinzo Abe. Beberapa bukti mengenai pergeseran sistem pertahanan pasif ke aktif oleh Jepang dapat dilihat dari keterlubatan negara ini dalam program war on terror, hingga pengamanan jalur pelayaran internasional pantai timur Afrika.

Kemudian khusus dalam menangani ICBM Korea Utara Amerika Serikat dan Jepang kemudian menjalankan kerjasama-kerjasama dalam mengembangkan sistem pertahanan pasif menjadi sistem pertahanan aktif yang diwujudkan melalui latihan bersama, dukungan alih teknologi, dukungan dalam forum kerjasama multilateral dan anggaran pertahanan luar negeri, sejak masa kepemimpinan Juichiro Koizumi. Berbagai bantuan Amerika Serikat ini pada akhirnya meninggalkan sistem pertahanan pasif/pertahanan lama yang relatif bergantung dengan pihak Amerika Serikat. Kerjasama ini sekaligus menjadikan sistem pertahanan Jepang menjadi sistem aktif dan modern, baik ditinjau dari personel, ataupun alutsista pada matra/angkatan darat, laut dan udara.

Kemudian kerjasama antara Amerika Serikat dan Jepang dalam menangani ICBM Korea Utara diwujudkan melalui pengembangan sistem *Ballistic Missile Defense* (BMD) dengan memanfaatkan sistem pertahanan Jepang dan Amerika Serikat *Aegis Ashore*. Kerjasama teknis pertahanan ini dilatar belakangi oleh fakta bahwa Jepang dan Korea Utara merupakan dua negara yang terletak di wilayah yang sama yaitu Asia Timur. Hubungan kedua negara yang cenderung memanas pada masa kepemimpinan Kim Jong Un mendorong pemerintah Jepang untuk menjalankan kebijakan teknis pertahanan

secara preferentif yang diwujudkan dalam pengembangan konsep Aegis Ashore.

Aegis Ashore merupakan sistem pertahanan udara yang dirancang untuk mencegah peluru kendali/misil musuh, yang umumnya misil jarak dekat dan menengah. Sistem ini dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang kemudian menjadi bagian dari kerjasama Jepang dan negara adikuasa ini dalam menangani ICBM Korea Utara. Aegis Ashore berharga sekitar 100 milyar Yen yang dibeli secara bertahap dan hingga tahun 2018 direncanakan pemerintah Jepang akan memiliki setidaknya empat unit Aegis Ashore, sedangkan untuk melengkapi misil pertahanan udara pemerintah Jepang juga merevitalisasi beberapa sistem pertahanan udara yang sebelumnya telah dimiliki melalui kerjasama antara perusahaan pertahanan dalam negeri Jepang Mitsubishi Corporation dengan *Raytheon Corporation* dan *Lockheed Martin Corporation* Amerika Serikat.

Aegis Ashore dipilih untuk mengantisipasi ICBM Korea Utara karena adanya beberapa pertimbangan, diantaranya efektifitas dan akurasi yang tinggi dan cukup handal. Selain itu, perangkat ini juga ditawarkan secara lunak oleh pemerintah Amerika Serikat, baik tempo, harga ataupun pembiayaannya. Selain itu, perangkat ini juga berhasil disepakati oleh parlemen Jepang secara aklamatif, sehingga dapat menjadi sistem pertahanan misil yang canggih dalam menghadapi berbagai ancaman terkini, khususnya ICBM Korea Utara yang daya jangkauannya dapat dengan mudah mencapai wilayah Jepang dan sekitarnya.

## **B. Saran**

Melalui penelitian ini dapat diajukan saran bagi para pemangku kebijakan dan akademisi hubungan internasional, yaitu :

1. Kepada pemangku kebijakan di Indonesia hendaknya dapat menyesuaikan berbagai orientasi politik luar

negerinya di wilayah Asia Timur agar tidak terseret jauh dalam konflik Laut China Selatan mengingat potensi perang secara terbuka tetap ada, namun belum pernah terjadi sehingga fenomena ini lebih lazim disebut sebagai arms race. Selain itu, pemerintah Indonesia perlu untuk menjalankan kebijakan keamanan prefontif untuk mengamankan wilayah Indonesia dari dampak terburuk atas peluncuran ICBM Korea Utara, diantaranya di wilayah Natuna, Sulawesi Utara dan beberapa wilayah lain yang lebih dekat dengan Laut China Selatan.

2. Kepada hubungan internasional diperlukan penelitian lebih lanjut tentang latar belakang atau alasan-alasan Korea Utara dalam pengembangan ICBM sehingga nantinya dapat diketahui mengapa negara ini begitu progresif dalam mengembangkan sistem persenjataan tersebut dan cenderung kooperatif dengan negara-negara sekawasan, termasuk menolak berbagai rekomendasi dari badan tenaga atom internasional (IAEA).